

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasinya. Penelitian dilakukan pada OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan data primer menggunakan teknik penyebaran kuesioner, sehingga memperoleh sampel berjumlah 45 dengan alat analisis yang digunakan adalah PLS-SEM menggunakan *Software* Warp-PLS versi 8.0. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kompetensi Pegawai (KP) Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- b. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- c. Komitmen Organisasi (KO) memoderasi hubungan antara Kompetensi Pegawai (KP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- d. Komitmen Organisasi (KO) tidak dapat memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah kota Bandar Lampung tingkatkan program pelatihan dan pengembangan pegawai untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial yang relevan dengan tugas mereka, evaluasi dan perbaiki sistem pengendalian

internal secara berkala untuk memastikan prosedur operasional tetap efektif dan transparan, serta tanamkan nilai-nilai komitmen organisasi melalui kegiatan internalisasi visi dan misi, sehingga pegawai memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi.

- b. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti budaya organisasi atau penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja dan kontrak kerja.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik.